

**KAMIS PAGINAN SEBAGAI MEDIA PELAYANAN PUBLIK
BUPATI KULONPROGO HASTO WARDOYO
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**FATAH NASHIR
10370026**

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Kamis paginan merupakan media penghubung antara rakyat dengan pemerintahan. Kamis paginan ini sering disebut dengan kamis paginan dan kamis paginan. Dengan model tatap muka secara langsung dengan seorang bupati. Ide kamis paginan digagas oleh Bupati Hasto Wardoyo sejak tahun 2011 sampai dengan 2016. Pastinya sebuah program kerja kamis paginan melahirkan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakatnya. Skripsi ini mengkaji, bagaimana penyelesaian kasus pada kamis paginan di Kabupaten Kulonprogo dalam proses pemerintahan dan Bagaimana kamis paginan pada pemerintahan Kabupaten Kulonprogo dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan berupa data primer meliputi, wawancara dan database yang diambil dari pemerintahan kulonprogo dan data sekunder dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, website yang berhubungan dengan program kamis paginan di Kabupaten Kulonprogo.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yakni data mengenai penyelesaian permasalahan dalam program kamis di Kabupaten Kulonprogo, disusun sesuai dengan fokus penelitian dan dianalisa dengan teori yang memiliki korelasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosiologi yuridis* yakni data direlevansikan dengan teks teori komunikasi politik dan musyawarah.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, penyelesaian kamis paginan di Kulonprogo secara umum sudah efektif dalam segi pelaksanaan dan penyelesaiannya terhadap masyarakat. Bagian penyelesaian yang belum efektif dengan jenis penyelesaian melalui disposisi dengan lembaga lain. *Kedua*, kamis paginan sebagai bentuk pelayanan publik, merupakan salah satu bentuk keadilan pemerintah. Keadilan oleh pemerintah Kulonprogo diwujudkan dengan menyelesaikan masalah melalui program kamis paginan. Pada penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Kulonprogo menggunakan media musyawarah. Penyelesaian dalam kamis paginan menggunakan musyawarah, yang sejalan dengan konsep *Siyasah Syar'iyah*.

Kata Kunci: *Kamis Paginan, Bupati Kulonprogo, Siyasah Syar'iyah.*



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatah Nashir
NIM : 10370026
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Juni 2017

Penulis



FATAH NASHIR
NIM: 10370026



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fatah Nashir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatah Nashir

NIM : 10370026

Judul : **KAMIS PAGINAN SEBAGAI MEDIA PELAYANAN
PUBLIK BUPATI KULONPROGO HASTO WARDOYO
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Juni 2017

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

NIP: 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-403/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : **KAMIS PAGINAN SEBAGAI MEDIA PELAYANAN PUBLIK BUPATI KULONPROGO HASTO WARDOYO DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATAH NASHIR
Nomor Induk Mahasiswa : 10370026
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Juli 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II,

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 21 Juli 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19610430 199503 1 001

MOTTO

*“Menggapai Tujuan,
Tanpa adanya batasan dalam Perjuangan”*

“Selalu berpikir ke depan, bertindak sejak sekarang”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan terutama kepada Ibuku dan Bapakku,

Ibu Lestari dan Bapak Muhammad Najib

. Selalu memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi untuk menuntut ilmu dari sejak kecil hingga menyelesaikan karya ini.

Akhir dari semua kata terima kasih kepada Sang Khaliq Allah SWT.

Selalu memberikan karunia-Nya kepada saya yaitu seluruh kesempatan menuntut ilmu-Nya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	I Żukira
يذهب	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis Ditulis	Â Falâ
---	---------------	--------------------	--------

	فلا		
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
والصلاة والسلام على سيد الأ نبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه والتابعين أجمعين.

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul. **“KAMIS PAGINAN SEBAGAI MEDIA PELAYANAN PUBLIK BUPATI KULONPROGO HASTO WARDOYO DALAM PERSPEKTIF SIYASAH”** Penyusunan skripsi ini merupakan bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orangtua saya, Ibu Lestari dan Bapak Muhammad Najib, yang senantiasa membimbingku sejak kecil hingga ke jenjang perkuliahan, serta doa, motivasi dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.

2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar dan tabah membimbing skripsi saya.
6. Bapak Sunaryo, selaku TU Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Hasto Wardoyo, selaku Bupati Kulonprogo yang telah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancara.
9. Para staf Bupati Kulonprogo, terutama kepada Bapak Ngadianto, Bapak Burhanudin dan Bapak Heri Widada. Serta kepada seluruh pegawai pemerintahan Kabupaten Kulonprogo yang telah memfasilitasi pada tahap penelitian sampai dengan selesai.
10. Kepada keluargaku, yang selalu memberikan dukungan serta do'a selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta saudaraku Hikmatul Hidayah yang selalu membuatku bahagia.

11. Kepada seluruh jajaran pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (BEM-FSH) masa bakti 2013-2014 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terimakasih yang setulus-tulusnya.
12. Kepada Sahabat-sahabat Korp Gerakan Mahasiswa Pembaharuan, Rayon Ashram Bangsa, PMII Fakultas Syariah dan Hukum. Terutama untuk Forum Group Discassen (FGD Sahabat)
13. Kepada seluruh Keluarga besar IMAKTA (Ikatan Mahasiswa Kebumen di Yogyakarta) sebagai tempat belajar dengan budaya kampung halaman sewaktu menuntut ilmu di Yogyakarta.
14. Kepada Seluruh Sahabat-sahabatku Imam, Rofik, Jundy, Dedy, Rojikin dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas persabatan selama di Yogyakarta.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan.

Yogyakarta, 7 Juni 2017

Penulis,



Fatah Nashir
10370026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SIYASAH SYAR'IIYAH DAN KOMUNIKASI POLITIK	21
A. Teori Siyasa Syar'iiyah	21
B. Teori Komunikasi Politik	38
BAB III PELAKSANAAN KAMIS PAGINAN DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO	51
A. Gambaran Singkat Kamis Paginan di Kulonprogo	51
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Kamis Paginan	56
C. Kamis Paginan Sebagai Media Pelayanan Informasi Publik	65

BAB IV ANALISIS KAMIS PAGINAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULONPROGO DALAM TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH	73
A. Pelaksanaan Kamis Paginan dalam Perspektif Siyasah	73
B. Analisis Kamis Paginan Sebagai Media Pelayanan Publik	78
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
1. FOTO.....	ii
2. TABEL.....	iii
3. WEBSITE	iv
4. TERJEMAHAN	v
5. CURRICULUM VITAE.....	vi
6. DOKUMEN	vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi PPID Kabupaten Kulon Progo ..	54
Gambar 2	Alur Permohonan Informasi Publik	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2014	65
Tabel 2	Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2015	66
Tabel 3	Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan Media Tahun 2014	66
Tabel 4	Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan Media Tahun 2015	67
Tabel 5	Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan Klasifikasi Tahun 2014	67
Tabel 5	Jumlah Pemohon Informasi berdasarkan Klasifikasi Tahun 2015	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi sorotan penting dalam permasalahan ketatanegaraan dan pengadministrasiannya. Pemerintah senantiasa berupaya keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya melalui program dan kegiatannya. Bagi kepala pemerintahan terpilih, usaha itu bisa menjadi perwujudan apa yang dikampanyekan di saat pemilihan umum, karena sebagian besar muatannya berisi janji-janji tentang pemberian layanan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan komunikasi tentang pelayanan publik yang tidak bisa dianggap remeh. Kegagalan dalam merumuskan, mendesain dan menyampaikan pesan tentang pelayanan publik dengan baik berakibat ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan dan ketrampilan dalam komunikasi pelayanan publik dan kemampuan mewujudkannya dalam kehidupan nyata akan memberikan nilai positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hardiansyah tentang pelayanan publik atau yang disebut dengan *new public service* (yang selanjutnya disebut dengan NPS). Pelayanan publik merupakan paradigma terbaru dalam administrasi publik sebagai kegiatan utama para administrator untuk menjalankan pemerintahannya. Karena sesuai dengan teori demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Demokrasi melingkupi aspek persamaan (*egalitarianism*) dan kebebasan (*liberty*). Bahwa seorang individu dalam konteks sebagai rakyat bebas

mengemukakan pendapat secara publik, juga seorang individu sama dihadapan sebuah hukum positif. Sehingga rakyat boleh mengemukakan pendapatnya kepada pemerintah dengan masalah yang dibawanya. Sebagai timbal baliknya pemerintah harus menampung semua pendapat untuk ditindak lanjuti dengan sebuah solusi.¹

Komunikasi ini merupakan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya (masyarakat). Dengan kata lain, hubungan Pemerintahan (*governance relations*) adalah hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah pada posisi dan peran. Melalui hubungan tersebut disalurkanlah informasi dari pihak yang satu dengan yang lain, mengenai dari atasan yang mendapatkan laporan dari bawahan atas suatu permasalahan.²

Bagian dari kajian pelayanan juga dijabarkan bagaimana komunikasi harus berjalan antara pemerintah dan rakyat. Gabriel Almond mengkajinya dalam teorinya tentang komunikasi politik. Menurutnya komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah".³

Meski kajiannya masih baru, namun dalam perjalanan awal pemerintahan Islam telah memberikan deskripsi bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan rakyat. Saat Nabi memimpin umatnya di Madinah, ia memeperkenankan masyarakat untuk berkunjung kepadanya dan mengutarakan keinginan atau

¹ Hardiyansyah, *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Gava media, 2015), hlm.. 2-3

² I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan, Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013). hlm. 127

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_politik, diakses tanggal 2 Februari 2017

mengadukan persoalan pemerintahan dan kesejahteraan. Komunikasi dalam musyawarah telah menjadi bagian penting dalam pemerintahan Islam. Munawir Sjadzali menegaskan, sebagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama pada waktu itu, oleh karena dari mekanisme pengambilan keputusan akan dapat diketahui tentang seberapa jauh anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan urusan kenegaraan.⁴

Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Nabi telah mengembangkan budaya komunikasi tatap muka antara kepala pemerintah dan umat melalui musyawarah. Beliau sendiri, meski seorang Rasul, tetap konsisten berkonsultasi dengan umat dalam soal-soal kemasyarakatan. Layanan komunikasi tatap muka pada masa pemerintahan Nabi melalui musyawarah tidak hanya mengikuti satu pola saja. Kerap kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior maupun dari kalangan profesional.⁵ Kemudian pada masa Khulafaurasyidin, musyawarah yang berhubungan dengan aspirasi rakyat, apabila ada kesalahan maupun kekurangan, maka rakyat boleh memberikan masukan kepada khalifahnyanya. Kemudian meminta kepada rakyat supaya taat selama dia tetap taat kepada Allah dan Rasul, dan agar tidak mendengarkan perintah kalau dia ternyata menyalahi ajaran Allah dan Rasul.⁶

Layanan Aspirasi dan pengaduan secara tatap muka seperti dalam musayawarah pada masa Nabi dan Rasulullah telah memberikan kontribusi penting pada pola administrasi pemerintahan sekarang. Pada pemerintahan tingkat

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 28

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

daerah di Indonesia ada yang telah mengadaptasi pola komunikasi publik itu sehingga memberikan dampak positif pada keberhasilan layanan publik bagi kesejahteraan warganya. Salah satunya adalah Kabupaten Kulonprogo yang berlokasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa pemerintahan tahun 2011-2016 di bawah pimpinan Hasto Wardoyo.

Sejak awal pemerintahannya, Wardoyo telah menyelenggarakan layanan komunikasi tatap muka dengan warganya untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, aduan atau hanya sekedar silaturahmi. Pada kesempatan yang sama, ia juga mengkomunikasikan beberapa program kerja yang dilaksanakan dalam satu periodenya. Program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya, maupun sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam suatu masyarakat.

Alasan penyusun skripsi ini mengambil tema dari bupati kabupaten Kulonprogo. Walaupun dalam pencalonannya lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menganut ideologi nasionalisme. Tetapi, dipandang dari koalisi yang digandeng, semuanya adalah Partai yang berideologi Islam, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu dari program kerja Bupati Hasto Wardoyo yang secara rutin. Meliputi Jumat Safari dan wajib zakat bagi PNS di lingkungan pemerintahan kulonprogo. Jumat Safari dilakukan dengan mendatangi masjid di seluruh Kulonprogo sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam setiap minggunya minimal satu masjid yang didatangi. Kemudian sekaligus menyerahkan zakat

kepada delapan penerima zakat. Dalam satu tahun zakat yang dibagikan sekitar dua ratus lima puluh juta.⁷

Layanan bupati Kulonprogo itu dikemas dalam program kerja kamis paginan setiap hari kamis pagi, jam 6.30 sampai selesai. Ketika bupati mengadakan komunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Saat itulah sebuah kamis paginan berlangsung, dalam hubungan secara vertikal maupun horizontal antara eksekutif dengan individu, kelompok, badan hukum (*recht person*) maupun yang lainnya. Kemudian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya fokus kepada program kamis paginan yang berbasis tatap muka secara langsung. Khusus untuk pembahasannya adalah tentang penyelesaian masalah yang dibawa oleh masyarakat ke dalam forum kamis paginan.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada layanan komunikasi tatap muka kamis paginan yang telah diselenggarakan di masa pemerintahan Bupati Kulonprogo masa bakti 2011 sampai dengan 2016. Dari batasan tersebut permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian kasus pada kamis paginan rakyat di Kulonprogo dalam proses pemerintahan?
2. Bagaimana kamis paginan pada pemerintahan kabupaten Kulonprogo perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

⁷ Sesuai wawancara dengan Bapak Hasto Wardoyo pada 5 Mei 2017, di pendopo yayasan sadewa Kulonprogo.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian:

- a. Mendeskripsikan tentang penyelesaian kasus yang dibawa masyarakat ke kamis paginan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo.
- b. Menganalisis kamis paginan pemerintah Kabupaten Kulonprogo dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah keilmuan atau wawasan teoritis tentang Kamis paginan Politik Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo serta dapat dijadikan rujukan penelitian lainnya dalam kajian yang sama
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontributor wawasan praktis khazanah ke-Bangsaan dan ke-islaman sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengambil kebijakan dan praktisi politik dalam berkoalisi bagi kepentingan bangsa dalam perspektif siyasah.
- c. Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu Program Studi Siyasah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan penelitian yang ada sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tema skripsi yang sepadan.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal, makalah tulisan-tulisan bebas, skripsi, tesis, dan disertasi yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Anindita Lintang Pakuningjati dengan judul “Pengelolaan Media Sosial dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Pengelolaan Media Sosial LAPOR! Sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Rakyat secara *Online* Oleh Deputi I Kantor Staf Presiden)”.⁸

Dalam skripsi ini fokus pada pembahasan mengenai pengelolaan media sosial LAPOR! Untuk layanan aduan dan aspirasi masyarakat pada pemerintahan. LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) merupakan sebuah media sosial yang lahir karena kebutuhan jembatan komunikasi antara pemerintah dengan publik sebagai salah satu bentuk komunikasi politiknya. Skripsi ini menggunakan media online sebagai komunikasi, sedangkan skripsi yang akan dibuat komunikasi dengan cara tatap muka secara langsung.

2. Skripsi karya Firas Fissilmi dengan judul “Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Menjelang Pemilu 2014 Perspektif Siyasah Syar’iyah”⁹

⁸ Anindita Lintang Pakuningjati, “*Pengelolaan Media Sosial dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Media Sosial LAPOR! Sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Rakyat secara Online Oleh Deputi I Kantor Staf Presiden)*”, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2015)

⁹ Firas Fissilmi, “*Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Menjelang Pemilu 2014 Perspektif Siyasah Syar’iyah*”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014)

Dalam skripsi ini pada pembahasan mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera (yang selanjutnya disebut dengan PKS). Komunikasi politik ini dilakukan untuk mengkomunikasikan antara partai politik dengan partisipan pemilih pada pemilu 2014. Pada saat itu PKS mendapatkan goncangan karena pengurusnya yang terseret kasus tindak pidana korupsi. Untuk itu PKS mencari bagaimana strategi supaya tingkat kepercayaan masyarakat terus meningkat. Diharapkan pencapaian suara hasil pemilu itu tetap tinggi. Dengan rumusan masalah strategi yang dilakukan oleh PKS menjelang pemilu 2014. Sedangkan skripsi yang akan dibahas mengenai komunikasi dengan media aspirasi politik. Komunikasi dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya dengan jalan musyawarah tatap muka.

3. Skripsi karya Suci Sitoresmi dengan judul “Efektifitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)”.¹⁰

Dalam Skripsi ini fokus pembahasannya tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Dalam Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dengan membuat kanal pengaduan masyarakat di level nasional yang bernama LAPOR!. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi e-government, LAPOR!

¹⁰ Suci Sitoresmi, *Efektifitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. 2013)

Merupakan aplikasi berbasis online yang mengadopsi sistem media sosial. Sedangkan skripsi yang akan dibahas kamis paginan menggunakan tatap muka, kemudian tipe penyelesaian kasus pasca diadakannya komunikasi.

4. Triantaka dan Griadhi juga memberikan gambaran penting tentang layanan pengaduan masyarakat dalam konteks perundang-undangan di Indonesia. Melalui pendekatan sosiologi hukum, keduanya berpendapat Bahwa setelah diundangkannya UU Pelayanan Publik, adanya pengaduan masyarakat menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.¹¹
5. Anomsari juga menyampaikan hasil penelitiannya tentang partisipasi public pada pemerintahan tingkat desa.¹² Dengan penelitian deskriptif kualitatif, ia mengidentifikasi ragam bentuk partisipasi yang muncul di desa terutama dalam pengelolaan hutan di Kebumen. Sorotannya juga mengarah pada bentuk komunikasi tatap muka antara lain Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Forum Komunikasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yang lainnya.

¹¹ Gusti Made Triantaka dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Pengaduan Masyarakat Sebagai Bentuk Partisipasi Dan Peningkatan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *E-Journal Kertha Negara Vol. 03, No. 02, Mei 2015*, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/13076/8752>

¹² Endah Tri Anomsari, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggayam, Kebumen)," *Jurnal Natapraja No.1 Vol. 1 2013*

6. Pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pelayanan publik melalui komunikasi tatap muka dianggap masih pilihan penting oleh Iqbal Saputra Zana dalam pemilihan umum kepada daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 2013. Melalui perspektif komunikasi politik dalam penelitian kualitatif deskriptif itu menyimpulkan Bentuk kegiatan tim kampanye untuk memperkenalkan pasangan calon biasanya dilakukan dengan kampanye terbuka. Kampanye dalam bentuk ini lebih memudahkan pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan menawarkan program-program kerja secara massal kepada masyarakat.¹³

Semua karya ilmiah di atas komunikasi yang terjalin pemerintah dengan publik menggunakan media sosial. Dalam penelitian ini, tekanan utama adalah interaksi pemerintah dan masyarakat secara tatap muka. Implikasinya sangat berbeda antar kedua jenis komunikasi. Pelaksanaan yang kedua lebih dinamis dengan ragam permasalahan masyarakat dan tanggapan pemerintah dalam kompleksitas bisa diketahui oleh masing-masing pihak secara simultan termasuk proses komunikasinya. Dinamika semakin jelas ketika pilihan tingkat pemerintahan rendah dan wilayah lebih kecil seperti pemerintahan Daerah Tingkat II. Intensitas pertemuan dan interaksi pemerintah dan rakyat semakin intens dibanding tingkat di atasnya dan wilayah yang lebih luas sehingga gesekan dan krentanan semakin mengemuka untuk segera diatasi supaya pelayanan publik semakin berkualitas.

¹³ Iqbal Saputra Zana, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013 Di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara," *eJournal Administrasi Negara Volume 3, Nomor 2, 2014, hlm. 837-847*

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membedakan dengan penelitian yang lainnya, dalam skripsi ini memberikan pembatasan pada pembahasan supaya lebih fokus dengan pokok masalahnya. Penelitian fokus pada penyelesaian masalah dalam program kamis paginan oleh Bupati Kulonprogo masa bakti 2011 sampai dengan 2016 yaitu Bapak Hasto Wardoyo. Hal ini dimunculkan supaya peneliti dalam melaksanakan penelitiannya tidak melebar dari segi pembahasannya.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang akan digunakan oleh penulis menggunakan teori musyawarah sebagai teori utama dengan didukung oleh teori umum yaitu teori komunikasi politik yang dicetuskan oleh Gabriel Almond pada sekitar tahun 1960. Teori musyawarah sebagai teori yang digunakan sesuai dengan keilmuan pada skripsi. Penggunaan teori musyawarah sesuai dengan keilmuan hukum Islam. Sedangkan teori komunikasi politik sebagai pendukung sesuai dengan pemerintahan. Penggunaan teori komunikasi politik dengan alasan pemerintahan yang berlaku di Indonesia dan hukum positif. Kemudian keduanya akan dipadukan sehingga pemerintahan di Kulonprogo dapat dilihat dari aspek hukum Islamnya. Uraian kerangka teori dibawah ini sebagai gambaran umum, sebagai berikut:

1. Teori Musyawarah

Musyawarah sesuai dengan tata bahasa Indonesia diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan

berembuk.¹⁴ Prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan asas hukum yang mendasari sebuah sistem demokrasi. Supaya mempunyai titik temu diantara pemerintah maupun rakyatnya. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (*pemerintahan atau kenegaraan*) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukanlah masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan.

Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara jelas dan tegas, baik langsung maupun tidak langsung yaitu dengan melalui Nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada persoalan yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat universal maupun tanpa petunjuk yang mengalami perkembangan maupun perubahan.

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Musyawarah memang merupakan tradisi Pra Islam yang sudah turun temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena musyawarah merupakan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.¹⁵

Musyawarah dalam Islam merupakan sebagai alat untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Bagi orang Islam, menerima azas musyawarah untuk membangun mufakat. Bagi semua orang Indonesia, musyawarah sebagai wahana konstitusional untuk mewujudkan asas kerakyatan dan demokrasi.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.603

¹⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 203

Musyawarah tidak hanya diajarkan dalam Islam, tetapi juga untuk bernegara di negara Indonesia.

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya. Setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka wajib terdengar oleh pemegang pemerintahan supaya dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan kebijaksanaan untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu memerlukan komunikasi politik untuk mendukung peran serta rakyat menyampaikan aspirasinya.

2. Teori Komunikasi Politik

Membahas sebuah teori selayaknya mengetahui juga sejarah awal kemunculan teori komunikasi politik. Memang istilah komunikasi politik masih relatif baru dalam ilmu politik. Istilah ini mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya tulisan Gabriel Almond, dalam bukunya berjudul *The Politik of the Development Area*, dia membahas komunikasi politik secara terinci.¹⁶

Menurut Almond, definisi komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk membandingkan berbagai sistem politik dengan latarbelakang budaya yang berbeda. Arti penting sumbangan pemikiran Almond terletak pada pandangannya bahwa semua sistem politik yang pernah ada di dunia ini, yang ada sekarang, dan yang akan datang nanti mempunyai persamaan-persamaan yang mendasar, yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankan oleh

¹⁶ Gabriel Almond, "Introduction: A. Functional Approach to Comparative Politics", dalam Gabriel A. Almond dan James S. Coleman (ed). *The Politics of the Developing Areas*, Princenton, N.J: Princenton University Press, 1960, hlm. 3-64

semua sistem politik. Menurut Almond, kita tidak boleh tertipu oleh struktur politik yang tampak berbeda, karena fungsi-fungsi yang dijalankan oleh struktur politik dalam setiap sistem politik adalah sama.¹⁷

Dari definisi komunikasi dan politik diatas, sehingga bisa memahami definisi komunikasi politik. Tentu keduanya berkaitan dengan masalah manusia dan hubungan sosial mengingat komunikasi adalah kajian tentang manusia (*human communication*). Sedangkan politik adalah kajian tentang gejala kekuasaan antara sesama manusia beserta relasi yang dibangun dalam lembaga-lembaga yang memiliki dimensi kekuasaan.

Komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Seperti yang dikemukakan oleh Almond, semua fungsi yang dilakukan dalam sistem politik, yaitu: (1) Sosialisasi Politik (2) Perekrutan (3) Artikulasi Interest (artikulasi kepentingan) (4) agregasi interest (agregasi kepentingan) (5) pembuatan aturan (6) aplikasi aturan dan (7) aturan putusan hakim, harus dilakukan melalui komunikasi.¹⁸

Bahwasanya komunikasi politik berhubungan erat dengan dengan ilmu komunikasi yang menyangkut interaksi dan hubungan yang terjadi antara dua orang/pihak bahkan lebih. Objek studi tentang ilmu komunikasi adalah komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Berhubung objek tersebut mencakup masyarakat luas, maka titik berat perhatian ilmu komunikasi mencakup komunikasi langsung/tatap muka. Ilmu komunikasi membahas secara *general* suatu hubungan komunikasi yang terdapat didalam masyarakat. Dengan

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Mochtar Mas' oed dan Colin Mall Andrew, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm 31.

menggunakan alat komunikasi maupun secara langsung baik secara individu dengan individu lainnya bahkan dengan kelompok.

Sesuai dengan perkembangan sebuah komunikasi, diperlukan pemahaman tentang teori komunikasi yang bersifat massa untuk mengarahkan pada tindakan dan keputusan. Pemahaman ini menyadari bahwa semua teori komunikasi adalah hasil konstruksi pemikiran manusia sehingga dinamis, selalu mengalami perubahan sebagaimana masyarakat, teknologi, dan manusia yang juga terus berubah. Kedinamisan ini sudah dapat dilihat dalam transformasi pemahaman mengenai proses komunikasi itu sendiri. Teknologi komunikasi yang baru telah mengubah pandangan tradisional tentang khalayak massa, komunikator massa dan hubungan antara keduanya.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk menganalisis suatu objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian *Field research* (Penelitian lapangan) untuk mengetahui bagaimana peraturan dan perundang-undangan administrasi Negara serta pelayanan publik berjalan di tingkat pemerintahan Tingkat II Kabupaten Kulon Progo dalam kegiatan kamis paginan dengan komunikasi tatap muka. Karena itu pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum.²⁰

¹⁹ Stanley J. Baran, dkk, *Teori Dasar, Komunikasi Pergolakan, dan Masa Depan Massa*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), hlm. 25.

²⁰ D. Walsh, *Doing Ethnography*, in C. Seale, *Researching Society Culture*, (London: Sage 1998) hlm. 217-218. Bahwa dalam etnografi lebih menekankan pada penjelasan pemahaman

2. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

a. Data Primer

Bahan primer adalah bahan yang dianalisis dan dikumpulkan sendiri oleh penyusunnya. Bahwa bahan primer yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Pertama, wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.²¹

Selain itu wawancara merupakan pertemuan antara periset dan responden didalam suatu tempat untuk mengambil sebuah data dari jawaban responden. Dari hasil wawancara tersebut akan menjadi bahan mentah yang akan diolah dipenulisan skripsi.²² Wawancara meliputi pelaksana kamis paginan wawancara dengan bupati Kulonprogo, sebanyak 2 orang staf dan peserta yang terkait dengan kamis paginan. Kemudian observasi mengamati sebuah objek penelitian secara langsung ditempat pelaksanaan. Karena dalam penelitian ini objeknya merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan berlanjut. Sehingga dalam observasi yaitu dengan mengamati jalannya kegiatan tersebut beserta yang terdapat disekitarnya.

b. Data Sekunder

ketimbang membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi. Etnografi tidak menggunakan asumsi tentang apa yang penting dan apa yang akan terjadi. Pengaruh konteks kultural adalah penting dan pendekatan riset ini memungkinkan fokus riset berubah selama jalanya pengumpulan data.

²¹ Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 104

²² Steward, *On the record: an introduction to interviewing*, in P Burnham (ed), *Surviving the Research Process in Politics*, (London: Pinter, 1997), hlm. 151

Bahan sekunder yakni yang dikumpulkan oleh orang atau organisasi lain. Bahan yang diambil dari kepopulerannya setelah atau sudah tersedia dengan memperhatikan kualitas yang tinggi berdasarkan topik yang ada. Literature yang sudah terdahulu mengaitkan dengan buku-buku, karya ilmiah, jurnal, tulisan para ahli politik, skripsi, tesis maupun disertasi serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Dengan menambahkan bahan yang mendukung seperti: database, sensus, dokumen maupun dari website. Dalam penelitian ini data sekunder diutamakan mengambil dari website pemerintah daerah kulonprogo dan database yang menjadi dokumen daerah yang disimpan oleh lembaga yang bersangkutan. Dengan memperhatikan jangka waktu yang dibatasi, sehingga diharapkan lebih fokus dalam penelitiannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi itu untuk pengumpulan data yang bersifat primer. Kemudian untuk data yang bersifat sekunder dengan data pendukung seperti karya ilmiah, buku, jurnal, tulisan para ahli yang berhubungan dengan politik, skripsi, tesis, disertasi maupun yang lainnya.

Wawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana institusi yang menangani kamis paginan itu beroperasi, bagaimana merespon masyarakat yang datang dan bagaimana penyelesaiannya. Mereka yang berhubungan langsung dengan atau memiliki posisi penting dipogram kamis paginan.

Kemudian observasi yang dimaksud adalah dengan mengamati proses kegiatan kamis paginan yang dilaksanakan di pendopo bupati Kulonprogo.

Pengumpulan data sekunder mengambil dari buku, karya ilmiah, website maupun yang lainnya. Sebagai data pendukung mengambil di website yang terkait dengan pemerintahan Kulonprogo. Data sekunder dimaksudkan untuk mengambil data yang sudah lampau sesuai dengan penelitian. Sehingga diharapkan data yang diambil lengkap dan lebih efisien tentang tata cara pengambilannya.

4. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode *analisis kualitatif*. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (*relevant*) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.²³ Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode *analisis-kualitatif* yang mana data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif.

Bahwa keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, diambil yang terkait dengan Kamis paginan Kabupaten Kulonprogo, kemudian dianalisis dengan perspektif siyasah secara utuh sehingga terlihat adanya

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3.

gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab keadaan pemerintahan yang ada di Kulonprogo serta perjalanan pelaksanaan kamis paginan selama lima tahun terakhir. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran sebagai solusi mengenai apa yang seharusnya dilakukan pada pelaksanaan kamis paginan di Kabupaten Kulonprogo.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penulisan skripsi ini nantinya terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Mengenai sistematikanya adalah sebagai berikut:

Pembahasan diawali dari Bab I merupakan pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi kerangka teoritis terhadap subjek penelitian berupa tinjauan tentang pelayanan dan partisipasi publik terutama yang berkaitan dengan prinsip dasar ketatanegaraan Islam (siyasah) dan komunikasi politik. Teori Komunikasi politik ini membahas secara umum dalam pelaksanaan kegiatan kamis paginan oleh Bupati Kulonprogo. Sedangkan teori musyawarah digunakan secara khusus untuk membahas kamis paginan dalam konteks politik Islam.

BAB III Deskripsi mengenai program kamis paginan di Kabupaten Kulonprogo yang dibentuk oleh Bupati Hasto Wardoyo. Kamis paginan sebagai

program kerja untuk mensukseskan sebuah pemerintahan, menjawab dari rumusan masalah mengenai penyelesaian masalah dalam program kamis paginan. Kemudian kamis paginan dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Dengan kata lain bahwa program kamis paginan sebagai media komunikasi antara pemimpin dengan rakyatnya.

BAB IV akan menganalisis hasil penelitian oleh penulis sekaligus mengkaji penyelesaian masalah dalam kamis paginan yang dibawa oleh masyarakat. Kemudian menganalisis program kamis paginan menurut perspektif *siyasah syar'iyah*. Bab V merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berupa kesimpulan dan saran.



BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Untuk menyimpulkan sebuah pembahasan, penyusun membagi menjadi dua bagian sesuai dengan rumusan masalah. Dengan menarik kesimpulan dari setiap bab yang dibahas. Sesuai dengan tema “Kamis Paginan Sebagai Media Pelayanan Publik Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo Dalam Perspektif Siyasa”. Berikut ini merupakan uraian dari kesimpulan tersebut, sebagai berikut:

1. Penyelesaian Kasus Dalam Kamis paginan di pemerintahan Kabupaten Kulonprogo. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menggunakan program Kamis paginan untuk mempermudah akses komunikasi rakyat dengan pemerintahnya. Kamis paginan ini diciptakan sebagai media memecahkan masalah dan mempermudah komunikasi. Dalam penyelesaian ini dibagi menjadi empat bagian metode penyelesaiannya, yaitu: *Pertama* Penyelesaian langsung, *kedua* penyelesaian lanjutan, *ketiga* penyelesaian dengan disposisi, dan *keempat* penyelesaian menggunakan rapat (musyawarah) oleh internal pemerintahan.

Keuntungan yang diperoleh, bagi masyarakat dan pemerintah jika pembuatan kebijakan publik dilakukan secara demokratis. Keuntungan pertama adalah adanya peningkatan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Peningkatan kualitas kebijakan publik pada gilirannya sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menjadi sasaran

kebijakan publik tersebut, Kedua adalah mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

Kamis paginan menjadi satu-satunya yang tidak tertulis. Mekanisme partisipasi masyarakat didalamnya berbeda dengan media dengan sarana tulis. Semua kalangan diperbolehkan bertemu langsung dengan Bupati. Secara tatap muka, Masyarakat memiliki kebebasan berhak untuk bertanya, memberi tanggapan dan masukan bahkan mengadukan. Bertujuan untuk memberikan masukan maupun aduan dari masyarakat yang bersangkutan, dengan permasalahan didalam masyarakat. Kemudian solusi diambil dengan cara musyawarah oleh para pihak dengan pemerintahan.

Partisipasi aktif dari masyarakat maupun pihak pasar dalam komunikasi dan musyawarah dalam bentuk kamis paginan dengan pemerintah daerah Kulon Progo bisa berdampak baik dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan dari layanan publik. Warga tidak lagi merasa teralinesasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik bahkan pelayanan tersebut bisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

2. Kamis paginan Politik menurut perspektif *siyasah Syar'iyah*.

Dalam pemerintahan yang adil salah satunya memperhatikan hak rakyatnya dengan menciptakan kamis paginan ini telah memenuhi dimensi penting dalam pelayanan publik. Pemerintahan yang adil berdampak positif pada pemenuhan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis. Diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Keadilan adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pemerintahan dalam melayani kepentingan publik sejalan dengan konsep *siyasah Syar'iyah*. Konsep tersebut dalam media aspirasi pemerintah Kulonprogo diwujudkan dengan musyawarah, ketika menyelesaikan masalah pada media aspirasi. Sehingga pelayanan publik dalam kamis paginan kamis paginan sebagai kemaslahatan bagi rakyatnya. Sesuai dengan kaidah fikih yang menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, keinginan keluarga maupun kelompoknya. "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan."

B. Saran

Selain membuat kesimpulan penyusun membuat saran yang mencakup media aspirasi politik, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk pemerintahan kulonprogo diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dalam program kerja kamis paginan tatap muka. Sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang program kerja tersebut. Karena kamis paginan kamis paginan merupakan, kamis paginan yang paling diminati oleh masyarakat. Sesuai dengan table pengunjung yang disimpan oleh PPID. Kemudian dalam

penyelesaiannya yang berupa disposisi terhadap lembaga lain. Supaya lebih ditingkatkan dengan bekerjasama lembaga terkait.

2. Bagi penulis selanjutnya disarankan meneliti kamis paginan dengan jenis yang berbeda. Karena pada penelitian ini hanya fokus pada kamis paginan yang bersifat tatap muka. Kamis paginan lainnya seperti yang bersifat online atau yang lainnya. Kemudian dari segi pembahasannya penyelesaian masalah yang diadakan, tetapi menggunakan kamis paginan lainnya. Juga efektifitas media lain dalam menjaring aspirasi dan menyelesaikan masalah.
3. Sebagai kamis paginan yang bersifat tatap muka, memang lebih sesuai dengan konsep musyawarah dalam Islam. Dalam mencari jalan keluar untuk duduk bersama antara pemerintah dengan rakyat. Penyelesaiannya menggunakan musyawarah bersama dari berbagai unsur. Karena musyawarah sejalan dengan konsep *siyasaḥ Syar'iyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Almond, Gabriel, "Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics", dalam Gabriel A. Almond dan James S. Coleman (ed). *The Politics of the Developing Areas*, Princenton, N.J: Princenton University Press, 1960.
- Ardial, *Komunikasi Politik*, Jakarta: PT Indeks, 2010.
- Arifin, Anwar, *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ash-Shiddieqy, T.M, Hasbi *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Matahari Masa, 1969.
- Baran, Stanley J, dkk, *Teori Dasar, Komunikasi Pergolakan, dan Masa Depan Massa*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ebyhara, Abu Bakar, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Fielding and Gilbert, *Understanding Social Statistics*, London: Sage, 2000.
- Fisher, B. Audrey, *Teori Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Hardiyansyah, *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gava media, 2015.
- Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih* . Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993.
- Maarif, Ahmad Sayfii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Mizan, 1995.
- Madaniy, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010).
- Marbun S.F. Dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Mas' oed, Mochtar dkk, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Mukti, Takdir Ali, dkk, *Membangun Moralitas Bangsa, amar ma'ruf nahi munkar : dari subyektif-normatif ke obyektif-empiris*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 1998).
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Alquran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi revisi, (Jakarta,: Rajawali Pers, 2011).
- Ridwan, H. Juniarso, dkk, *Hukum Adminsitrasi Negara dan dan Kebijakan Pubik*, Bandung: nuansa, 2009.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta, Laksbang, 2008).
- Sinambela, Lijian Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bandung: Bumi Aksara, 2006.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Steward, *On the record: an introduction to interviewing'*, in P Burnham (ed), *Surviving the Research Process in Politics*, London: Pinter, 1997.
- Sumarno, A.P, *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sumaryadi, I Nyoman Prof. Dr., *Sosiologi Pemerintahan, Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.

Syafiie, Inu Kencana dkk, *Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Toha, Suherman, dkk., *Penelitian Hukum Tentang Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Jakarta: BHHN Kemenkumham RI, 2011).

Walsh, D, *Doing Ethnography*, in C, Seale, *Researching Society Culture*, London: Sage, 1998.

Lain-lain

Ahmad Zaini, Dakwah Melalui Mimbar Dan Khitabah, *At-Tabayir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember 2013*.

Anindita Lintang Pakuningjati, “*Pengelolaan Media Sosial dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Media Sosial LAPOR! Sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Rakyat secara Online Oleh Deputi I Kantor Staf Presiden)*”, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, (2015)

Dahyul Daipon, Terorisme Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, *Alhurriyah : Journal Hukum Islam Vol 16, No 1 (2015)*.

Endah Tri Anomsari, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggayam, Kebumen),” *Jurnal Natapraja No.1 Vol. 1 2013*.

Firas Fissilmi, “*Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Menjelang Pemilu 2014 Perspektif Siyasah Syar’iyah*”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014)

Gusti Made Triantaka dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Pengaduan Masyarakat Sebagai Bentuk Partisipasi Dan Peningkatan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”, *E-Journal Kertha Negara Vol. 03, No. 02, Mei 2015*, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/viewFile/13076/8752>

Hasbullah Malau, “Menyoal Pelayanan Publik yang Berkualitas di Era Otonomi Daerah,” *Demokrasi Vol. VIII No. 1 Thlm. 2009*.

Hikmatun Nida Soraya, *Penggunaan Media Massa Oleh Wakil Rakyat (Studi Relasi DPRD Kabupaten Temanggung dan Media Massa)*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2008)

- Iqbal Saputra Zana, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013 Di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara," *eJournal Administrasi Negara Volume 3, Nomor 2, 2014*.
- Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002),hlm.115; Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," *Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014*.
- Muchlis Usman. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002,hal.150; lihat juga Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," *Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014*.
- Muhammad Sabir, "Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar, Suatu Pendekatan Hadis Dakwah Dalam Perubahan Sosial," *Potret Pemikiran Vol 19, No 2 (2015)*.
- Muhammad Zikri Waldi, "*Dilema antara Perjuangan Aspirasi Rakyat dan Pragmatisme Elite Politik dalam Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi terhadap Pandangan Tokoh Politik Nasional)*", Yogyakarta: Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2012)
- Muhammadiyah, Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas, Vol. III No.1 April 2013*.
- Naili Rohmah Iftitah, "Islam Dan Demokrasi," *Islamuna Volume 1 Nomor 1 Juni 2014*.
- Nuriyanto, "Rembug Pelayanan Publik (RPM) Sebagai Aktualisasi Pelayanan Publik Berlandaskan Demokrasi Pancasila," *Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015*.
- Priyanto Susiloadi, Peranan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik, *Spirit Publik Volume 2, Nomor 2 Oktober 2006*.
- Suci Sitoresmi, *Efektivitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. (2013)
- Yanto Heryanto, "Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Jurnal Logika, Volume XII, No 3 Tahun 2014*.
- PPID, Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2013, 2014, 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_politik,

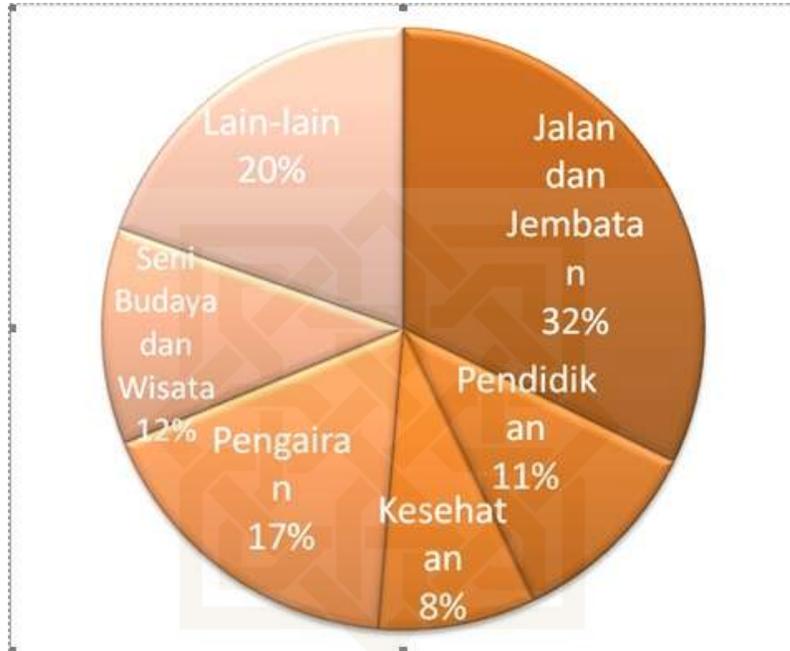
Al Yasa Abubakar, "Al-Siyasah Al-Syar`Iyyah Dan Uli Al-Amr: Pengertian Dan Cakupan Isi," <http://alyasaabubakar.com/2015/06/al-siyasah-al-syariyyah-dan-uli-al-amr-pengertian-dan-cakupan-isi/>. Diakses pada tanggal 30 April 2017



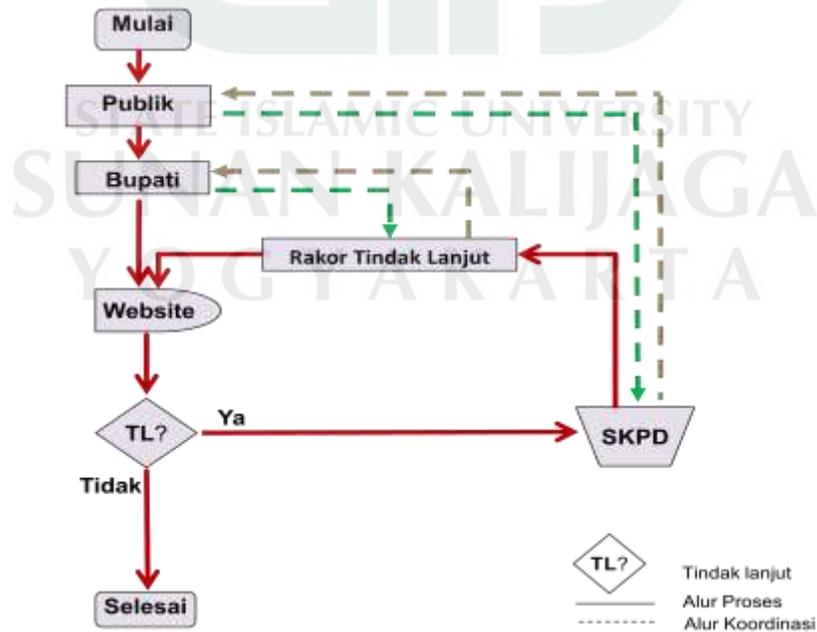
Lampiran-lampiran



Tabel tentang hasil penyelesaian kasus tahun 2015



Tabel tentang alur proses media aspirasi open house



PPID - Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

ppid.kulonprogo.kab.go.id/rekap_aduan.html

INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!
ppid.kulonprogo.kab.go.id

Home | Hubungi Kami | Kontak | Kulon Progo

Sekilas Pandang

- Profil PPID
- Dasar Hukum
- Struktur Organisasi
- Sengketa Informasi
- Maklumat PPID
- Mekanisme Layanan
- PPID Pembantu
- SOP
- Inovasi

Daftar Informasi Publik

- DIP PPID Kab. Kulon Progo
- Dip SKPD

Aduan

Rekap Aduan

Pemohonan Informasi

INFORMASI MILIK BERSAMA
KAMI SIAP BERBAGI

No.	Pengantar	Jat Aduan	Tanggapan
1	<p>Meneliti website: sami</p> <p>Tanggal: 14-03-2017</p> <p>Nama: Tri</p>	<p>Sebagai masyarakat kulon progo merasa tidak puas atas pembangunan renovasi Monumen KM AGENG SERANG Sebagai ikon KP dan pembangunan Air Mancur Alun-alun. Yang menelan dana tidak sedikit. Dan hasilnya sangat simpang lina karang nongko terlihat bersang. Monumen itu malam lidas terit. Air mancur juga seperti itu. Mohon untuk pihak terkait untuk di tindak lanjut. Terimakasih. Eka Bell Kulon Progo</p>	<p>Terima kasih atas masukannya.</p>
2	<p>Meneliti website: rtz</p> <p>Tanggal: 17-11-2016</p> <p>Nama: rtz</p>	<p>mengenal pembangunan tambanngkat sungai di desa langsihan II, hargemulyo yang dipagar saar ini tidak sesuai prosedur dan sama sekali tidak ada pengawasan dari dinas terkait.</p>	<p>terima kasih atas informasinya, mengenai pembangunan tersebut untuk pengawasan akan kami sampaikan kepada bidang terkait. ttd admin</p>
	<p>Meneliti website: rtz</p>	<p>Disampaikan thw jalan disepan penggingan batu Pura Diatari di Bangunuclo banyak berserak kerikil dan</p>	<p>Terima kasih atas masukannya, kami sampaikan bahwa dari hasil pengeseran lokasi terdapat bahan hampuran berupa kerikil dan pasir yang berserak di jalan berstatus bagy</p>

09/06/2017 1:00

Terjemahan

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	77	86	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
3	36 82	44 94	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka
4	86	102	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung
5	86	103	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk
6	78	89	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

CURRICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

A. DATA PRIBADI

Nama : Fatah Nashir
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 11 Desember 1991
Nama Ayah : Muhammad Najib
Nama Ibu : Lestari
Agama : Islam
Alamat Lengkap : RT 03 RW 02 Desa. Petanahan, Kecamatan
Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Telepon / HP : 085747702801
E-mail : fatahnashir@gmail.com

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- Pendidikan Formal
 - 1998 – 2004 : MI Negeri Grogol Penatus, Petanahan, Kebumen
 - 2004 – 2007 : MTs Negeri Klirong, Kebumen
 - 2007 – 2010 : MA Negeri 1 Kebumen
 - 2010 – Sekarang : S-1 Hukum Tata Negara (Siyasah), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ikatan Mahasiswa Kebumen di Yogyakarta
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Perwakilan No 1. Telp. (0274)773010 Fax. (0274)773148 Wates 55611

Wates, 2 April 2015

K e p a d a:

Yth. Bupati Kulon Progo

Di Wates

SURAT PENGANTAR

No. 480/1862

No.	Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekapitulasi Konsultasi Warga Hari: Kamis, 2 April 2015	1 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

an. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
Ub. Asisten Perekonomian Pembangunan dan SDA
Kepala Bagian TI dan Humas

RUDY WIDIYATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk.I/ IVb
NIP. 19631024 199031008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KONSULTASI WARGA DENGAN BUPATI

Hari/Tanggal : Kamis, 2 April 2015
 Pukul : 06.30 – 08.45
 Tempat : Rumah Dinas

No	Nama	Alamat/Instan	Keperluan	Disposisi Bupati	Tanggapan	Ket
1	Sudiono	Kriyanan RT 29 RW 13 Wates	<p>Terkait pembangunan makam di Kriyanan. Benar sudah merespon dan memberikan deadline tanggal 22 Maret 2015. Saya menyampaikan saya pindah tidak masalah. Jika saya tidak pindah maka makam harus dibongkar. Tanggal 22 Maret 2015 tidak ditepati hingga mundur tanggal 29 Maret 2015, Bp Umar Sanusi datang ke rumah untuk minta maaf. Namun belum ada tindak lanjutnya. Saya hanya minta kepastian saja karena dalam beberapa hari ini air yang mengalir di rumah bau bangkai. Tanggal 30 Maret 2015 Bp Umar menghubungi kami dan menyampaikan bahwa saya bisa tetap tinggal di Kriyanan. Namun makam belum ada kelanjutannya. Kami mohon kejelasan.</p>		<p>Bupati: Kami sudah meminta kepada Desa untuk merespon. Namun jika itu belum mencapai titik temu maka kami akan mengupayakan kembali. Harapan kami kedua belah pihak tidak boleh suudzon dan berusaha untuk mengupayakan yang terbaik. Dengan demikian tidak ada yang sakit hati dan permasalahan mudah diselesaikan. Jika nantinya tanah ingin dibeli, kami menyarankan Bapak juga memasang harga yang sewajarnya.</p>	
2	Ikatan Mahasiswa Kulonprogo (08574346181 2)	Krembangan	<p>Menyampaikan laporan kegiatan tahun lalu dan rencana kegiatan tahun ini. Kami mempunyai kerjasama dengan UGM dan disbudparpora untuk mengembangkan wisata Kulonprogo dan BMSC (futsal) yang merupakan acara rutin kami apakah diijinkan jika kami mohon sertifikat dari Pemda, Tryout untuk siswa SD. Dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan forum OSIS tanggal 19 April 2015 namun biaya sewa Gedung Kaca cukup mahal. Mohon keringanan sewa dan mohon masukan untuk program kerja kami.</p>		<p>Bupati: Usulan kami ada kegiatan Bursa Studi Lanjut ke Perguruan Tinggi dengan mengadakan diskusi tentang sekolah gratis di Indonesia. Misalnya STIS, STAN, IPDN, Sekolah Perkebunan, Sekolah Penerbangan, dll. Informasi tersebut sangat dibutuhkan terutama untuk siswa yang miskin. Nantinya sambil jalan bisa mengembangkan sayap PT di luar negeri baik untuk S1, S2, maupun S3. Mudah-mudahan sukses di tahun 2015.</p>	

<p>3</p> <p>dr. Susilo (08180274777 8)</p>	<p>Panitia Kajian Islam Kulonprogo</p>	<p>Kegiatan kami sudah berjalan sekitar 7 tahun untuk mendakwahkan Islam di seluruh Kulonprogo. Dulu rutin 1 bulan sekali di Masjid Agung, lalu dipindahkan ke Masjid Dharmais. Terkait kajian yang kami laksanakan ada beberapa hal yang bisa dikerjasamakan. Pada tanggal 5 April 2015 pukul 20.00 WIB kami akan mengadakan pengajian di Masjid Dharmais dengan mengambil tema hikmah dibalik musibah. Hal ini dilatarbelakangi dengan terjadinya beberapa musibah yang terjadi secara berturut-turut. Kami mohon kehadiran dan perkenan Bp Bupati untuk memberikan sambutan. Tema yang kami angkat adalah tema kontemporer termasuk mengenai ISIS, kami mengangkat tema dampak negatif ISIS terutama dalam dunia maya, kewajiban masyarakat untuk taat pada pemerintah.</p> <p>Kami juga mempunyai kajian setiap Rabu malam Kamis di Masjid Agung. Selain itu kami juga berencana untuk menyelenggarakan pengobatan dan cek kesehatan gratis. Mohon dukungan.</p>	<p>Bupati: Kami sangat setuju dengan tema ini. Namun mohon maaf tidak bisa hadir karena harus ke Banjarmasin untuk menjadi narasumber di sana pada Senin pagi tanggal 6 April 2015. Kami mohon doa restu untuk membentuk takmir Masjid Agung. Seharusnya Masjid Agung adalah milik Pemda namun kenyataannya Masjid Agung hanya dikelola oleh kelompok masyarakat tertentu. Kami sudah menghubungi takmir dan mereka berkenan untuk menyerahkan kepemimpinan Masjid Agung beserta aset di dalamnya. Susunan takmir maksimal akan selesai pada Bulan Agustus. Mohon doa restu. Kami juga membentuk Perda untuk melarang tempat hiburan malam dan diharuskan untuk tutup selama bulan Ramadhan. Kami juga membatasi adanya organisasi yang terlarang semacam itu sehingga masyarakat aman dan tenteram. Jika ada masalah apa dalam masyarakat silakan dibantu. Misalnya: Khitanan massal, nikah massal, dll.</p>
<p>4</p> <p>Yusrön (08180436831 5) sebanyak 2 orang</p>	<p>Majalah KUNTUM</p>	<p>Kami adalah majalah remaja KUNTUM. Kami mengadakan roadshow jurnalistik ke seluruh Indonesia. Bulan depan kami akan ke Kulonprogo untuk memberikan pelatihan jurnalistik kepada siswa. Alangkah lebih baik jika dalam pelatihan itu nantinya kami bisa membagikan majalah dengan profil Bapak sehingga siswa lebih mengenal Bapak. Untuk itu mohon waktu untuk wawancara.</p>	<p>Bupati: Silakan menunggu di luar, setelah selesai aspirasi silakan wawancara.</p>

5	Yorha Purwanto (08773907355 1), Edi Eko Purnomo, Thomas	Pengurus Yayasan Surya Nuswantoro, Klebakan, Demangrejo, Sentolo	Kami mempunyai 9 pengurus di setiap desa. Program kerja kami dalam bidang ekonomi dan sosial. Dana kami tinggal dari Bp Tuntas Subagyo (swasta). Keppres Nomor 15 Tahun 2014 tertanggal 28 Februari 2015. Visi misi kami memakmurkan masyarakat Indonesia. Tujuannya memakmurkan masyarakat Kulonprogo yang agamis. Kami sudah mendaftarkan ke Kesbanglinmas. Mohon dukungan.	Kami mempunyai 9 pengurus di setiap desa. Program kerja kami dalam bidang ekonomi dan sosial. Dana kami tinggal dari Bp Tuntas Subagyo (swasta). Keppres Nomor 15 Tahun 2014 tertanggal 28 Februari 2015. Visi misi kami memakmurkan masyarakat Indonesia. Tujuannya memakmurkan masyarakat Kulonprogo yang agamis. Kami sudah mendaftarkan ke Kesbanglinmas. Mohon dukungan.	Bupati: Kami mendukung adanya yayasan dalam masyarakat. Akan lebih baik jika diurus ijinnya ke Kesbanglinmas. Silakan cek Keppres Nomor 15 Tahun 2014 di internet dan didownload. Jika ternyata berbeda silakan menuntut ke pengurus propinsi. Kami hanya ingin mengamankan saja dan turut meneliti.
6	Ngatemi (08574334918 1)	Klepu, Hargowilis	Suami saya Muhyadi/Muh. Bilal sebelumnya sudah pernah menikah dan istrinya meninggal lalu menikah dengan saya. Usia kami saat ini 65 tahun. Kami mempunyai banyak hutang. Sedang suami saya sudah sakit-sakitan. Mohon bantuan pekerjaan.	Bupati: Silakan temui kakak saya Ibu Siti di rumah.	
7	Ibu Duku , Suminten (08522621054 2)	Mendiro, Gulurejo, Lendah	Ada orang yang mewakafkan tanah dan saat ini sudah kami bangun TK ABA Mendiro. Saat ini masih ada tanah yang kosong rencana untuk membangun PAUD. Mohon Bapak berkenan untuk meresmikan pada tanggal 4 April 2015 di Mendiro.	Bupati: Jika tidak ada acara yang mendesak dan bersamaan kami akan datang.	
8	Bambang Basuki (08132819966 4), Bu Siti	Purwosari, Girimulyo	Anak pertama saya sedang hamil, HPL tanggal 16 April 2015 ingin melahirkan di RSKIA Sadewa. Saat ini tinggal di Demakijo. Mohon keringanan.	Bupati: Silakan bawa catatan saya. Jika sudah terasa silakan ke RS dan tunjukkan catatan saya agar saya ditelepon. Akan lebih baik jika sebelumnya juga periksa dulu agar saya tahu kondisinya.	

9	Gunawan (08564323329 3)	Triharjo, Wates	<p>Beberapa waktu lalu hidung anak saya kemasukan kacang lalu kami periksa ke puskesmas Panjatan. Katanya tidak bisa dan harus ke RSUD Wates (Poli THT) kara hari Sabtu maka diminta operasi di RS Rizki Amalia namun kami tidak kesana karena trauma. Lalu kami ke RS Kharisma katanya tidak bisa. Lalu kami ke dokter praktek dr. Sunaryanto dan tetap diminta untuk ke Rizki Amalia Galur. Kami ke sana dan akhirnya dioperasi. Namun pelayanan tidak menyenangkan, bahkan kami tidak diberikan obat padahal waktu itu anak saya tidak bisa bernafas dan kepalanya panas dan ada item yang kami bayar namun tidak masuk dalam nota yang kami bayarkan. Misalnya sewa alat operasi. Sejak operasi sampai sekarang batuk dan pilek tidak sembuh-sembuh. Mohon arahan.</p>	<p>Bupati: Pak Lestaryono silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya, konfirmasi mengapa pada waktu itu tidak bisa ditangani di RSUD Wates.</p>
---	-------------------------------	-----------------	--	---

Kepala Bagian TI dan Humas



RUDY WIDIYATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk.I/ IVb
NIP. 19631024 199031008





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Perwakilan No 1. Telp. (0274)773010 Fax. (0274)773148 Wates 55611

Wates, 13 April 2015

K e p a d a:

Yth. Bupati Kulon Progo

Di Wates

SURAT PENGANTAR

No. 480/2033

No.	Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekapitulasi Konsultasi Warga Hari: Kamis, 9 April 2015	1 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

an. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
Ub. Asisten Perekonomian Pembangunan dan SDA
Kepala Bagian TI dan Humas

RUDY WIDIYATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk.I/ IVb
NIP. 19631024 199031008

KONSULTASI WARGA DENGAN BUPATI

Hari/Tanggal : Kamis, 9 April 2015
 Pukul : 06.30 – 08.45
 Tempat : Rumah Dinas

No.	Nama	Alamat/Instansi	Keperluan	Disposisi Bupati	Tanggapan	Ket
1	Sumantri, Mantan Carik Bumirejo	Gulurejo, Lendah	Anak saya dinas di Irian (Dinas Kebersihan dan Pemakaman). Pendidikan terakhir S1 Akuntansi. Mohon dapat mutasi kerja ke Kulonprogo untuk merawat orang tua.		Bupati: Silakan membuat permohonan mutasi ke BKD dilampiri persetujuan dari atasan langsung dan berkas kepegawaian lainnya agar dikaji.	

2	<p>Dukuh Kembang Nanggulan (Sarijo) 085292283142, Moko Terbah</p>	<p>Kembang, Jatimulyo, Nanggulan</p>	<p>Dukuh: Terhitung Januari 2015 kami membuka desa wisata. Mohon bantuan pebaran jalan dari arah Kutogiri dan Gunung kelir untuk mendukung pariwisata. Hari Minggu kemarin mencapai 1000 pengunjung. Moko: Beberapa waktu terakhir kami sedang konsen untuk mendampingi tempat wisata diantaranya Kalibiru dan Puncak Menoreh Suroloyo. Kami ingin menggarap susur sungai (canyoning) yang ada air terjunnya dengan repling. Untuk menyusuri sungai membutuhkan waktu 1,5 - 2 jam. Kami ingin melink-kan Kedung pedut dan Kalibiru. Air di Kedung Pedut berganti-ganti sesuai dengan arah penyinaran matahari. Kami juga ingin mengembangkan jeep offroad menyusuri Sungai Serang. Bisa satu paket sampai ke Kedungpedut, dll. Untuk crosscountry downhill juga dulu kami yang membuka dari Kalibiru-Clereng. Hanya saja jika digunakan kejurناس membutuhkan lokasi yang dekat dengan media evaluasi.</p>	<p>Bupati: Seluruh program untuk tahun 2015 sudah dianggarkan tahun 2014 sehingga saat ini tinggal melaksanakannya. Namun jika hanya perawatan jalan bisa dilakukan tanpa perencanaan 1 tahun sebelumnya. Silakan diinformasikan saja di mana membutuhkan waktu 1 tahun untuk dianggarkan. Mengingat pengadaan lahan untuk jalan membutuhkan waktu yang lama, ada alternatif lain dimana Pemda membebaskan kantong parkir dan masyarakat Desa menyewakan mobil kecil untuk menuju lokasi. Silakan saja dikembangkan offroadnya. Mana yang diminati. Memang masyarakat kita unik, imbas yang muncul kadang out of the box. Silakan gagasan besar anda dipresentasikan dihadapan SKPD terkait sehingga dalam waktu tertentu bisa diimplementasikan dan difasilitasi oleh Pemda pada tahun mendatang. Wabup: Ada jalan yang sulit untuk dilebarkan karena sisinya adalah jurang sehingga yang bisa dilakukan adalah membuat kantong papasan. Sambil menunggu anggaran, silakan memanfaatkan wisatawan yang senang avonturir. Dalam tempat wisata itu perlu juga disediakan makanan kuliner lokal sebagai daya tarik lain.</p>
---	---	--	---	--

dengan divacum dan anak saya masuk NICU pada hari Rabu. Kami akan mengurus jamkesmas namun ditolak karena anak ke-7. Kami diminta untuk ke BPJS, dari BPJS kami diminta untuk ke Dinsos. Karena jalan buntu kami menemui Dewan (Bp Sihabudin) dan diminta bertemu Pak Paryanto dan disampaikan sebenarnya tidak bisa namun karena kasihan kami akan diberi asalkan membawa surat pengantar dari RSUD Wates. Namun karena tersinggung dengan ucapan Bp Paryanto, kami tidak mengurus lagi dan surat diminta oleh Pak Sihabudin untuk diurus. Mohon bantuan Bp Bupati untuk minimal menegur beliau agar hal yang sama tidak terulang kembali mengingat selain saya pastinya banyak yang juga mengalami hal yang sama.

Itulah pak keriyat saya, saya ingin mengasuh banyak orang, jika sudah lebih dari 30 orang maka pasti ada yang tidak baik. Saya selalu menyampaikan dalam berbagai forum bahwa pelayanan publik harus mengutamakan logoss, etos, dan pathos, sehingga bisa menyajikan pelayanan prima. Semoga kita bisa segera menindaklanjuti sehingga pelayanan publik dalam masyarakat lebih baik. Pada prinsipnya jamkesda kami peruntukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Hanya saja anggarannya terbatas sehingga kami membatasi Rp 5.000.000/orang.

<p>5</p> <p>Bambang Wijono, Pengusaha Makanan Kulonprogo</p>	<p>Peristiwa tanggal April 2015 kami sudah menempati kantor baru dengan peralatan yang kami beli sendiri. Namun jika ada kursi yang tidak terpakai bisa dipinjamkan kepada kami. Selain itu kami mohon bantuan alat (HT, Kamera, dll) mengingat kegiatan kami juga sudah mulai banyak. Diantaranya: penanganan anak terlantar bersama dingsos, monitoring komunitas jalan (Toyan-perbatasan dan alun-alun), rakerwil, baksos, pam dalam peringatan sewindu meninggalnya Ki Hadi Sugito, Untuk permasalahan pasir di Sungai wilayah Kalibawang sudah teratasi. Sudah tidak ada penambangan dan tidak ada protes lagi.</p>	<p>Bupati: Seluruh kegiatan Paksi Katon mohon dikoordinasikan dengan Satpol PP agar tidak terjadi miskomunikasi.</p>	<p>Bupati: Jika berbicara ekspor pasti syaratnya sulit dan perfect. Hebatnya orang lokal adalah jika usaha tidak dibayar pajaknya tidak jadi beli. Prof. Lasiyo akan mewakafkan tanah seluas 1.500 m di Gerbosari untuk membangun masjid, pondok dan asrama santri. Apakah masih ada bantuan untuk membangun?</p>
<p>Bupati: Seluruh kegiatan Paksi Katon mohon dikoordinasikan dengan Satpol PP agar tidak terjadi miskomunikasi.</p>	<p>Bupati: Jika berbicara ekspor pasti syaratnya sulit dan perfect. Hebatnya orang lokal adalah jika usaha tidak dibayar pajaknya tidak jadi beli. Prof. Lasiyo akan mewakafkan tanah seluas 1.500 m di Gerbosari untuk membangun masjid, pondok dan asrama santri. Apakah masih ada bantuan untuk membangun?</p>	<p>Bupati: Seluruh kegiatan Paksi Katon mohon dikoordinasikan dengan Satpol PP agar tidak terjadi miskomunikasi.</p>	<p>Bupati: Jika berbicara ekspor pasti syaratnya sulit dan perfect. Hebatnya orang lokal adalah jika usaha tidak dibayar pajaknya tidak jadi beli. Prof. Lasiyo akan mewakafkan tanah seluas 1.500 m di Gerbosari untuk membangun masjid, pondok dan asrama santri. Apakah masih ada bantuan untuk membangun?</p>

6	Sri Subini, Yuli Susanto (087839786816)	Karangtengah lor RT 11 RW 06 Margosari Pengasih	Kami ingin mengajukan permohonan bantuan gerobak angkriangan. Saat ini menjalankan usaha berjualan angkriangan dengan gerobak sewaan. Suami bekerja sebagai tukang tambal ban. Kami mempunyai 1 orang anak usia 16 tahun yang saat ini sekolah di SLB N Panjatan.		Bupati: Surat kami terima untuk kami tindaklanjuti.
7	Mahmud Yasin (085643701487)	Piyono, Ngambol, Purworejo	Saat ini petani kesulitan dalam menjual produknya. Salah satu sebabnya adalah karena berhadapan dengan tengkulak. Salah satu solusi yang kami tawarkan adalah membangun sistem ekonomi kerakyatan.		Bupati: Silakan dipresentasikan di depan Dinkop dan UMKM.

Kepala Bagian TI dan Humas



RUDY WIDIYATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk.I/ IVb
NIP. 19631024 199031008



Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2014
 Pukul : 06.30 – 08.45 WIB
 Tempat : Rumah Dinas

No	Nama	Alamat/Instansi	Keperluan	Disposisi Bupati	Panggepian	Ke
1	Margiyono (081578997697), Mujiyono, Munawar, Rismiadi, dkk	Sogan wates	<p>Bagaimana kepastian pelaksanaan pajak tasda? Kami sudah diaudit sejak tahun 2010, kami keberatan dengan pajak 1% dari omzet yang diterapkan. Keuntungan kami hanya sedikit, kadang keuntungan yang kami dapatkan tidak cukup untuk membayar pajak. Jika tidak ada kepastian maka petani bisa menjadi korban. Mohon arahan bagaimana baiknya. Mohon Gapoktan dapat diberikan kewenangan untuk memberikan surat kuasa kepada karyawan untuk menandatangani kontrak. Kami kesulitan untuk ke sana kemari. Saat ini ada 13 gapoktan yang mensuplay beras ke BULOG. Mohon arahan.</p>		<p>Bupati: Kami tingkaskan harganya, ongkos transport (Rp 1.600) kami upayakan untuk diberikan kepada petani agar harganya lumayan. Jika kulakan sekarang dijual Bulan Juni kami yakin bisa namun saat ini uang belum turun padahal jika kulakan dilakukan pada Bulan Juni uangnya tidak cukup. Mengenai pajak 1% banyak orang yang keberatan. Akan kami komunikasikan dengan KPP Pratama Wates. Nantinya minggu depan kita bisa bertemu untuk berdiskusi bersama dengan KPP Wates di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Untuk penandatanganan kontrak bisa dilaksanakan secara serentak di Rumah Dinas Bupati. Kita bisa mendatangkan BULOG untuk berdiskusi. Nanti Pak Eko, Pak Maman, dan Pak Bambang akan menghubungi BULOG.</p>	
2	Jumariyah (081392590011)	Mentobayan, Salamrejo, Sentolo	<p>Kami ini orang miskin namun tidak pernah mendapatkan BLT. Dukuh Ibu Puji Sudarsih. Padahal orang yang mempunyai mobil dan kaya raya malah dapat.</p>		<p>Bupati: Silakan surat dari saya diserahkan Pak Kades untuk dirapatkan dengan BPD dalam Musdes.</p>	
3	Samsiah	Bendungan lor, Bendungan Wates	<p>Kami orang miskin namun tidak pernah mendapatkan BLT. Padahal yang kaya justru dapat.</p>		<p>Bupati: Silakan surat dari saya diserahkan Pak Kades untuk dirapatkan dengan BPD dalam Musdes.</p>	

4

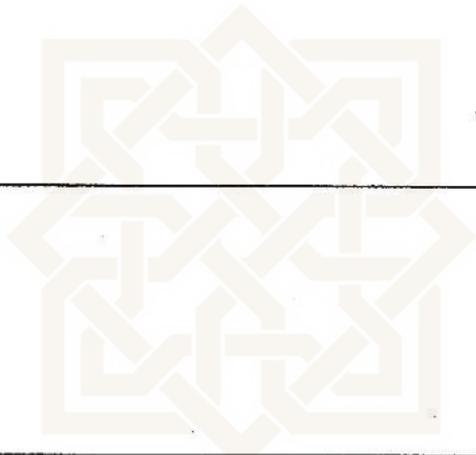
didaftarkan BPJS kesehatan 2 bulan yang lalu. Kami belum didaftar sebagai BPJS ketenagakerjaan sehingga harus menggunakan BPJS kesehatan. Dalam prosesnya mengalami hambatan karena masalah administratif. 2) Ada karyawan kami yang kecelakaan dibawa ke Puskesmas Sentolo II hanya diberi obat nyeri dan disuruh pulang, padahal setelah dirontgen di RSUD Wates karyawan kami retak pada jari kakinya. 3) Ada istri karyawan yang melahirkan masuk di kelas III RSUD Wates padahal jatahnya di kelas II dengan BPJS TK karena ribet mengurus administrasinya. Begitu diurus saat itu juga bisa dipindah ke kelas II. Kesan yang kami tangkap, menggunakan BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan prosedurnya lebih sulit daripada yang membayar.

PLN melakukan pemadaman selama 8 hari full dari jam 10.00 - 16.00 WIB yang berdasarkan surat pemberitahuan. Selain itu juga ada pemadaman yang mendadak karena rabas-rabas, dsb. Kami berharap tidak ada pemadaman karena dengan itu kami rugi waktu dan produksi karena dengan pemadaman itu mesin tidak bekerja sehingga karyawan juga harus diiburkan. Kami sudah mengkomunikasikan kepada PLN, kami minta dapat disampaikan jadwal pemadaman misalnya jadwal selama 6 bulan.

5

Bupati: PLN bukan lembaga di bawah Bupati atau Gubernur. Untuk itu kita bisa mempertemukan PLN dengan perusahaan di Sentolo. Tidak harus ada saya. Kalau bisa lakukan minggu depan. Untuk usaha kami bisa membangun tungku dan kopra bagi kelompok pengusaha.

Menurut dokter Ka. Puskesmas, dari 155 diagnosis baru bisa dilayani sekitar 70% karena alat dan sumber dayanya. Dokter hanya ada 2 orang sedangkan Ka. Puskesmas lebih ke struktural. Perawat hanya ada 6 untuk rawat inap dan 5 orang untuk rawat jalan. Ambulance ada 1 stand by pada jam kerja, kalau malam on call. Tidak bisa melakukan operasi besar, hanya bisa jahit luka dan dan uci-uci. Untuk Puskesmas Sentolo I sudah lebih baik. Dari 155 diagnosis sudah bisa dihandle. Fasilitas lengkap dokter intensif 4 orang dan stand by 2 orang. Perawat 15 orang, bidan 15 orang, ambulans 3 buah stand by 24 jam. Jam praktek dokter jam 07.30 - 20.00 WIB. Diluar itu untuk UGD dokter stand by bisa dipanggil. Kendalanya kurang dokter untuk melayani poliklinik. Beberapa kasus: 1) Di RSUD Wates ada karyawan yang sudah

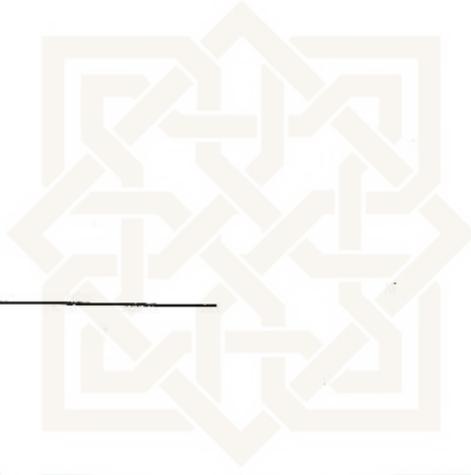


UNIVERSITY
ALIJAGA
KARTASURA

Pengetaja Pabrik
Arang Salamrejo (
PT Dian Niaga
Yogyakarta)

Terima kasih atas giatnya yang telah dibentangkan kami mempunyai karyawan 139 orang (76 orang laki-laki dan 63 orang perempuan). Karyawan dari Sentolo 60%, dari daerah lain 35% dan 5% dari Yogyakarta. Dalam hal kesehatan, berdasarkan hasil kunjungan di 2 puskesmas yang menjadi rujukan karyawan. Di Puskesmas Girimulyo I, pemahaman BPJS TK dan kesehatan masih terbatas, yang pernah mendapatkan sosialisasi hanya dokter dan sebagian tenaga medis. Komplain karyawan yang ada diantaranya: 1) Dokter hanya praktek dari jam 08.00-13.00 WIB. 2) Penjelasan penyakit maupun tindakan kurang bisa dipahami keluarga pasien. 3) Kurang sabar dalam menjelaskan dan terkesan ketus/galak. 4) Susah diminta rujukan, karena yang bisa memberi rujukan hanya dokter.

Sebagai kami mempunyai jaminan jammeda untuk orang yang malas mengurus BPJS. Namun kami hanya bisa memberikan pelayanan di kelas III dengan biaya maksimal Rp 5 juta. Syaratnya hanya membawa KTP atau KK. Untuk kasus yang terjadi silakan dapat dijelaskan kronologisnya (nama, alamat, tanggal perawatan, dan waktunya). Dengan demikian kami bisa merunutnya dan menjadikannya bahan evaluasi bagi kami.



KALIJAGA UNIVERSITY
KALIJAGA
YOGYAKARTA

	<p>Saat ini kami juga merintis usaha gula kelapa, sebulan 1000 liter dengan batok sebanyak 3 ton. Namun akses jalan di Dusun Tegalsari RT 05 RW 03 Purwosari Girimulyo hanya berupa gang sempit dan belum ada listrik PLN. Lokasi tersebut dihuni 12 rumah sepanjang kurang lebih 350 m dan tidak ada tiang. Ada 7 rumah yang sudah pasang selebihnya menyambung dari rumah ke rumah. Ketika kami akan melakukan pemasangan sudah tidak bisa karena maksimal hanya 5 saja atau 150 m dari kabel utama. Padahal kendaraan keluar masuk dari jalan tersebut, 1 minggu minimal 1 truk melewati jalan tersebut. Selain itu kami juga sudah banyak menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar. Pemasaran juga kami bantu informasikan kepada masyarakat untuk mempermudah pemasaran.</p>	
<p>Panitia Seminar Nasional SMAN 1 Pengasih (Wonosidi RT 03/RW 12)</p>	<p>Kami akan melaksanakan Seminar Nasional untuk forum guru bekerjasama dengan UST. Mohon berkenan Bapak Bupati membuka secara resmi pada tanggal 16 Mei 2015 di Gedung Kaca. Untuk guru yang ingin studi lanjut S2 ke UST sudah diberikan jalan. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemarin sudah berjalan 1 rombongan di Pengasih. Kami juga akan menyelenggarakan Wayang Kulit dengan dalang Ki Anom pada Bulan September 2015.</p>	<p>Bupati: Bagus sekali, kami sangat mendukung untuk seminarnya dan studi S2nya. Kami ikut melindungi adanya studi tersebut.</p>

Kepala Bagian TI dan Humas



RUDY WIDIYATMOKO, S.Sos.
 Pembina Tk.I/IVb
 NIP. 19631024 199031008

Yth. Bupati Kulon Progo
Di Wates

SURAT PENGANTAR

No. 480/ 2376

No.	Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Rekapitulasi Konsultasi Warga Hari: Kamis, 23 April 2015	1 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

an. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
Ub. Asisten Perencanaan Pembangunan dan SDA
Kepala Bagian TI dan Humas



RUDY WIDIYATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk.I/ IVb
NIP. 19631024 199031008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KONSULTASI WARGA DENGAN BUPATI

: Kamis, 23 April 2015
 : 06.30 – 07.30
 : Rumah Dinas
 Bupati

Nama/Instansi	Keperluan	Disposisi Bupati	Tanggapan	Ket.
CV Hidayah Duta Sarana	Kami ingin menjalin kerjasama dengan PT SAK dalam hal produksi AMP di Kulonprogo. Kami sudah punya tanah dll. Namun sampai saat ini format kerjasama masih deadlock. Mohon arahan.		Bupati: Silakan bertemu lagi dengan PT SAK di sini mengenai bagaimana baiknya. Saran kami, ibu juga jangan bersikukuh, cari jalan keluar terbaik. Mengenai pajak yang harus diselesaikan yaitu PPh dan PPhn menjadi beban umum semua orang yang menjalankan usaha. Ikut PT SAK itu sebenarnya aman karena sudah terbiasa dengan disiplin pajak sebagai perusahaan pemerintah. Jika ibu mendirikan CV atau PT baru maka bisa jadi akan diaudit oleh pajak dan bisa jadi habis.	

<p>UPN Veteran Yogyakarta (Kedungdowo RT 53 RW 24)</p>	<p>Kami dari LPPM sudah mengajukan permohonan MoU. Surat sudah berproses. Rekan kami dari teknik industri akan menjalin kerjasama dengan Dinkop dan UMKM. Kami diberikan arahan untuk mendampingi industri tenun di Sentolo dan pengolahan kakao di Banjararum mengingat ada bantuan alat yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami sudah ke sana untuk survey lokasi. Kami juga mempunyai SDM handal yang juara nasional dalam pengelolaan koperasi, kami berharap bisa membantu masyarakat.</p>	<p>Kami mengajukan technopark, namun harus memenuhi syarat trihelic adanya kerjasama antara pemerintah daerah, universitas dan pihak ke-3. Petani kakao kami belum melakukan fermentasi sehingga hasilnya belum baik. Kakao di Kulonprogo bentuknya kecil-kecil sehingga bukan kualitas yang terbaik. Namun jika difermentasi kami berharap harganya bisa lebih tinggi. Pernah ada alumni UGM di Lampung yang sukses mengembangkan usaha kakao untuk di ekspor ke Belgia dalam hal pembuatan coklat monggo. Akan sangat luar biasa jika kakao kita memenuhi syarat kualitas sehingga bisa mensuplay kebutuhan coklat monggo. Untuk tenun sebenarnya kebutuhannya luar biasa banyak untuk 6 rumah sakit besar yang ada di Kulonprogo dan pengadaannya juga tidak perlu lelang. Jika dapat dibantu akan sangat luar biasa.</p>	
<p>Plampang II, Kalirejo, Kokap</p>	<p>Ibu saya janda sejak tahun 2001 an. Rebi. Tahun 2008/2009 pernah kebakaran juga. Kondisinya kurang mampu namun tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kami mohon bantuan bedah rumah.</p>		<p>Bupati: Silakan bawa catatan saya ke Pak Kades untuk dimasukkan dalam pembahasan musdes. Salam dari saya untuk Pak Kades.</p>

4	Misbah Abdurrahman (085729530002) 7 orang	Warga Tangkisan Ili Hargomulyo, Kokap	Kemarin tanaman kelapa kami akan mendapatkan sertifikasi organik dari Jakarta. Saat ini ada 600 pohon dengan hasil 60 ton per bulan. Namun menurut informasi, Bapak tidak berkenan. Mohon arahan.		<p>benar, mereka menawarkan uang dan sertifikasi namun kita akan sangat terikat dengan mereka, harus menjual kepada mereka. Itu merembut kemerdekaan Bapak untuk menjual kepada pihak lain. Kami ingin melindungi masyarakat. Dengan menjual curah (95%) rasanya keuntungan sudah besar, namun akan lebih besar lagi jika kita bisa melakukan pengolahan lebih lanjut. Itu yang akan memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat. Hanya saja pemerintah membutuhkan waktu untuk pencairan dana. Tolong Pak Eko cari waktu yang saya ada untuk mempertemukan Dipertahut, anda, dan pihak terkait. Jika tidak silakan mencari CSR dari perusahaan yang bukan penjual gula sehingga bantuan yang diberikan tidak berpamrih. Wakil Bupati: Pada awalnya memang menarik, namun jika mereka yang mensertifikasi kita tidak lagi mempunyai bargaining untuk menentukan kita akan menjual ke mana dengan harga berapa.</p>	
5	Hendro (081392533877)	Pengurus Bulutangkis PERSADA Demen Temon	Mohon informasi apakah ada bantuan dana untuk kami di Kokap. Kami mempunyai 36 orang atlet anak sekolah.		<p>Bupati: Anggaran kami berikan kepada KONI. Nantinya KONI yang akan membaginya kepada cabor. Jadi bukan per klub. Silakan mengajukan bantuan ke PBSI. Ketua PBSI Kulonprogo adalah Pak Rudi (Kepala DPPKA)</p>	

6	Bagus Loka (083867339519)	Wates Bussiness Forum (WBF)	<p>Dalam diskusi bisnis Kulonprogo, kami memandang bahwa dalam hal membangun airport city semangatnya masih kurang sehingga kami melakukan berbagai pelatihan untuk masyarakat di Taman Wana Winulang. Awalnya kami memasarkan produk kami melalui online. Namun kami akan melebarkan sayap dengan berbagai macam kegiatan. Kami akan membuka lapak secara bersama-sama misalnya 1 kali seminggu baik secara online, dengan media massa, dll. Kegiatan awal akan kami lakukan tanggal 3 Mei 2015.</p>	<p>bagus untuk memanfaatkan Taman Wana Winulang. Nantinya di sana kami akan membangun Kantor Satpol PP sehingga jika kesan negatif yang ada di sana dapat terhapuskan. Selain itu disana ada perpustakaan yang dilengkapi dengan internet, itu bisa dimanfaatkan. Nantinya catatan hari ini akan kami berikan lembar disposisi. Silakan ditindaklanjuti ke KLH dan DPU.</p>
---	------------------------------	--------------------------------	---	---

Kepala Bagian TI dan Humas



RUDY WIDIYATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19631024 199031008

